



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Medan Bapaneh Rawang Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100/ 06 /SK-PERKIMTANLH/VI/2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 29 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas jabatan Struktural Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJADINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja;
- b. Penetapan Kinerja;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan melaksanakan Keputusan ini pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Bidang yang terkait dengan Indikator Kinerja ini.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Juni 2026

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



ROLI BUCHARI, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19750417 200501 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100/ 06 /SK-PERKIMTANLH/VI/2026

TANGGAL : 18 JUNI 2026

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 - 2029

**Indikator Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029**

a. Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berkinerja tinggi untuk menciptakan permukiman yang layak huni dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan		Rasio permukiman layak huni	Angka	0,9877	0,9878	0,988	0,9881	0,9882	0,9884	0,9885	
2			Indeks Respon Lingkungan Hidup	Angka	0,6	0,65	0,675	0,7	0,725	0,75	0,775	
3		Meningkatnya Kematangan Inovasi Dinas PerkimtanLH	Nilai Kematangan Inovasi Dinas PerkimtanLH	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
4		Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas PerkimtanLH	Angka	88,91	89	89,51	90,11	90,71	91,31	91,91	

5		Terpenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	(%)	92,9065	93,2033	94,4274	95,6515	96,8756	98,0977	99,33238	
6		Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	50	52	55	58	61	65	70	
7		Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Tahunan)	%	0	0	15.47	15.97	16.52	17.12	17.77	

b. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	positif	%	7.168	6.995	6.822	6.648	6.475	6.302	6.129	
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	positif	%	0	0	0.01398	0.0279	0.0419	0.0559	0.0699	
4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	positif	%	1	20	25	30	35	40	45	
5	Rasio rumah layak huni	positif	Angka	0.2043	0.2049	0.2057	0.2067	0.2077	0.2089	0.2103	
6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan	positif	%	10	25	30	35	40	45	50	

	Utilitas Umum)										
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
8	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	positif	%	5	5	10	10	10	10	10	
10	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	positif	%	88.55	89.55	90.55	91.55	92.55	93.55	94.55	
11	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	positif	Persentase	0	0	100	100	100	100	100	
12	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	positif	Persentase	0	10	20	30	40	50	60	
13	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	Positif	%	0	0	10	20	30	40	50	

14	Tersedianya tanah untuk masyarakat		%	0	5	10	15	20	25	30	
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
15	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Positif	%	30	31	32	33	34	35	36	
16	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Positif	Persentase	30	31	32	33	34	35	36	

Penjelasan Indikator Kinerja

1. Urusan Perumahan Kawasan Permukiman

a) Rasio Rumah Layak Huni

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

b) Indeks Respon Lingkungan Hidup

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: $IRLH = (\Sigma (Xi / Xi \text{ maks})) / n$ - <i>IRLH = Indeks Respon Lingkungan Hidup</i> - <i>Xi = Nilai parameter lingkungan ke-i</i> - <i>Xi maks = Nilai maksimum parameter lingkungan ke-i</i> - <i>n = Jumlah parameter lingkungan yang digunakan</i> Parameter lingkungan yang digunakan dapat meliputi: <i>1. Kualitas udara</i> <i>2. Kualitas air</i> <i>3. Kualitas tanah</i> <i>4. Keanekaragaman hayati</i> <i>5. Pengelolaan limbah</i> <i>6. Perubahan iklim</i>
Sumber Data	: Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Penanggung Jawab	: Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

c) Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: <i>Hasil Penilaian Inovasi Government Award (IGA) yang merupakan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri</i>
Sumber Data	: Hasil Inovasi Masing Masing Bidang
Penanggung Jawab	: Sekretariat dan Masing Masing Bidang Pengampu Inovasi

d) Nilai AKIP Perangkat Daerah

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: <i>Hasil Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkimtan LH oleh Inspektorat (Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat)</i>
Sumber Data	: Sekretariat dan Semua Bidang
Penanggung Jawab	: Sekretariat

e) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau (%)

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

f) Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (%)

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Realisasi Sertifikat Asset Pemda}}{\text{Target Sertifikat}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab	: Bidang Pertanahan

g) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) (Tahunan)

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>
Formulasi	: <i>Perhitungan Melalui Aplikasi signsmart dukungan data dinas Pertanian, Sektor Energi Kehutanan dan Limbah</i>
Sumber Data	: Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkimtan LH
Penanggung Jawab	: Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

h) Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi : $\frac{\text{Sampah Yang diolah}}{\text{Total Sampah}} \times 100 \%$

Sumber Data : UPTD Pengelolaan Sampah

Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

i) Proposi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah RT Kumuh Perkotaan}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

j) Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Lingkungan Yang di dukung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

k) Persentase Areal kawasan Kumuh (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)

Formulasi : $\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS)
Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab : Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

l) Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Kategori Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

m) Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah rumah tangga fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

n) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

o) *Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kab/ Kota}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

p) *Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota / Kota}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
Penanggung Jawab	: Bidang Perumahan Kawasan Permukiman

2. Urusan Pertanahan

a) *Persentase luas Lahan Bersertifikat (%)*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Luas Lahan Yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Luas Wilayah}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Pesisir Selatan Dalam Angka (BPS) Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab	: Bidang Pertanahan

b) *Penyelesaian Kasus tanah Negara*

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Dasar (IKD)</u>
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Kasus Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Yang Terdaftar}} \times 100 \%$
Sumber Data	: Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab	: Bidang Pertanahan

c) Penyelesaian izin lokasi (%)

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Dasar (IKD)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Izin Lokasi}}{\text{Permohonan Izin Lokasi}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab : Bidang Pertanahan

d) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang ditrerbitkan

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab : Bidang Pertanahan

e) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab : Bidang Pertanahan

f) Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100 \%$

Sumber Data : Bidang Pertanahan
Penanggung Jawab : Bidang Pertanahan

3. Urusan Lingkungan Hidup

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Formulasi :
$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,291 \times IKL)$$

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

b) Indeks Kualitas Air

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Output)

Formulasi :
$$PI_{Titik1} = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2 M + (Ci/Lij)^2 R}{2}}$$

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

c) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)

Formulasi :
$$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total timunan sampah kab/kota}} \times 100\%$$

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Penanggung Jawab : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

d) Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Outcome)</u>	$\times 100 \%$
Formulasi	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100 \%$	
Sumber Data	: Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
Penanggung Jawab	: Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	

e) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Jenis Indikator	: <u>Indikator Kinerja Kunci (Output)</u>	
Formulasi	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100 \%$	
Sumber Data	: Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
Penanggung Jawab	: Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	

f) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani

Jenis Indikator : Indikator Kinerja Kunci (Outcome)
Formulasi : $\frac{\text{Pengadaan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100 \%$
Sumber Data : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Penanggung Jawab : Bidang Penataan, Penaataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman Pertanahan dan Lingkungan
Hidup KabupatenPesisir Selatan



ROLI BUCHARI, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19750417 200501 1 013